



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Klaim Nine-dash Line China: Pendekatan Pertahanan Indonesia***

Skripsi

Oleh

Berlinda Nefertiti Goldy Salaki

2014330052

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Klaim Nine-dash Line China: Pendekatan Pertahanan Indonesia***

Skripsi

Oleh

Berlinda Nefertiti Goldy Salaki

2014330052

Pembimbing

Idil Syawfi S.IP., M.Si.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Berlinda Nefertiti Goldy Salaki  
Nomor Pokok : 2014330052  
Judul : Klaim *Nine-dash Line* China: Pendekatan Pertahanan Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 11 Januari 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Albert Triwibowo, S.IP., MA.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlinda Nefertiti Goldy Salaki  
NPM : 2014330052  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Klaim *Nine-Dash Line* China:  
Pendekatan Pertahanan Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Januari 2018



Berlinda Nefertiti Goldy Salaki

**ABSTRAK**

Nama : Berlinda Nefertiti Goldy Salaki  
NPM : 2014330052  
Judul : Klaim *Nine-dash Line* China: Pendekatan Pertahanan  
Indonesia

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan pertahanan yang Indonesia lakukan secara spesifik terhadap sengketa di LCS. Dalam sengketa tersebut, secara tidak langsung Indonesia terkena implikasi dari meningkatnya tensi dan dinamika kawasan. Posisi netralitas Indonesia sebagai *non-claimant* sekaligus *honest broker* di kawasan pun menjadi sulit, terutama adanya tumpang tindih atas klaim *Nine-dash Line* China pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna yang berpotensi menjadi ancaman. Indonesia pun menunjukkan signifikansi pertahanannya melalui kebijakan pembangunan serta peningkatan kapabilitas militer di Kepulauan Natuna dan sekitarnya yang berada dekat dengan wilayah LCS. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendasarkan analisis pada kerangka teori *Offense-defense Balance* Robert Jervis (1978), peneliti menemukan bahwa orientasi pendekatan pertahanan Indonesia cenderung defensif dalam menanggapi sengketa di LCS walaupun di tengah kondisi adanya peningkatan kapabilitas militer Indonesia yang cukup signifikan.

Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan Pertahanan, Kebijakan Luar Negeri, Laut China Selatan, China, Klaim Wilayah, *Offense-defense Balance*, Pembangunan Militer

**ABSTRACT**

*Name* : Berlinda Nefertiti Goldy Salaki  
*NPM* : 2014330052  
*Title* : *Claim Nine-dash Line China: Indonesia's Defense Approach*

---

*This research aims to identify the defense approaches that Indonesia apply specifically against disputes in the SCS. Indirectly, Indonesia has been exposed by the implications of increasing tension and dynamics from the region. Indonesia's neutrality position as non-claimant as well as an honest broker in the region becomes difficult, especially due to the overlapping of China's Nine-dash Line claims on Indonesia's ZEE territory in Natuna which has potential to become a threat. Indonesia also demonstrates its significance on defense matters through construction military facilities as well as increased military capabilities in the Natuna Islands and surrounding areas that are close to the SCS region. This research using qualitative research methods which grounded to Robert Jervis Offense-defense Balance theory (1978), the researcher found that the orientation of the Indonesian defense approach tended to be defensive in responding the disputes at the SCS despite the significant increase in Indonesian military capability.*

*Keywords: Indonesia, Defense Policy, Foreign Policy, South China Sea, China Territorial Disputes, Offense-defense Balance, Military Build Up*

## KATA PENGANTAR

Topik Laut China Selatan telah menjadi pembicaraan yang cukup mengemuka saat ini. Banyaknya kejutan yang diawali klaim *Nine-dash Line* China menjadi kompleks dan menyeret kawasan Asia Tenggara juga ASEAN ke dalam dinamika sengketa yang tak kunjung usai. Begitupun Indonesia sebagai *non-claimant state*, Jakarta berada di posisi terbawa arus sengketa maupun ikut menyelami proses negosiasi yang ada di tubuh ASEAN. Menjadi menarik untuk melihat respon Indonesia dari segi pertahanan mengenai klaim ini terutama dengan adanya wilayah kedaulatan Indonesia yang ikut diklaim pada perairan Natuna dan menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Adapun usaha Indonesia melakukan peningkatan aspek pertahanan disangka akan menggeser konsistensi PLN RI sebagai *honest broker*.

Adapun peneliti berharap tulisan ini bisa menjadi salah satu rujukan akademik dalam memahami dinamika sengketa LCS dengan keterlibatan Indonesia di dalamnya. Karena terbatasnya pembahasan, peneliti harap ke depannya terdapat tulisan lainnya yang mampu mengeksplorasi topik ini dari sudut pandang lainnya.

Penulis mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu terwujudnya tulisan ini dan memohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan.

Bandung, 5 Januari 2018

Berlinda Nefertiti G. S.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas pencapaian yang Allah Subhanahuwata'ala Ridhoi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Atas segala rencana dan berkatnya penulis mampu melewati proses sulit dan berat selama penyusunan ini yang sarat akan pembelajaran tak hanya dalam aspek akademis saja;
- Adapun, skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Benny Djunilius Salaki dan Ibu Yuniarsih yang senantiasa mendorong dan mengharapkan kelulusan anak bungsunya serta telah mendukung studi penulis selama ini;
- Tulisan ini pun saya dedikasikan kepada Almarhumah Diandra Dewi, S.IP., M.Sc., dosen favorit yang sering dikatakan mirip dengan saya dan selalu makan Mie Jak serta baso tahunya bersama. Banyak alasan saya untuk menjadi lebih baik setelah mendalami studi keamanan dan bekerja bersama dalam Praktik Diplomasi juga dalam belajar bahasa inggris akademik karenanya. Saya sangat rindu padanya dan sedih karena tidak bisa ikut mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Semoga Tuhan selalu menyertainya;
- Untuk teman saya Almarhum Prana Alfarisi, semoga kamu bisa lihat dari sana bahwa teman-teman kamu banyak mendapat kebaikan dari mu. Gelar dan



pencapaian selama di HI UNPAR saya dedikasikan untuk kamu agar kita bisa sama-sama S.IP., *you'll be missed*;

- Terima kasih saya sampaikan pula pada dosen pembimbing saya, yaitu Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si. yang dengan sabar dan optimis membimbing dan mengarahkan saya juga menyatakan saya bisa sidang serta lulus 3,5 tahun walaupun progress yang saya lakukan cukup lambat serta mepet. Semoga kebaikannya senantiasa dibalas;
- Terima kasih juga saya sampaikan pada Letnan Kolonel Syamsul Bachri serta Ka Airen Widhia yang telah membantu saya dalam mengakses data-data yang saya perlukan. Serta kepada Letkol Sugeng idola saya, Mayor Laut Hondor Saragih yang sudah menganggap saya sebagai kawannya, Kapten Kusnaeni yang sudah seperti ayah saya, Letkol Ranon terbaik, Letkol Arifin, Ibu Risti, Mas Radhit, Ibu Hesti, Ibu Karsi, Ibu Miharti dan Mba Ocha, serta Bapak/Ibu lainnya yang mendukung saya dalam menyusun proposal penelitian selama menjalani magang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya dapat menjadi bagian DitKersin;
- Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman saya ROGER 69 yang selalu bersama sejak semester pertama hingga saat ini. Mereka selalu menjadi alasan saya untuk tertawa dan menyayangi mereka. Alhamdulillah saya dan Fuad Ali Azmi dapat menjadi sarjana pertama Roger, saya tunggu kabar sidang dari Reizka Dwidianto, M. Ali Tanthowi, Reyhan Raharjo, Revinsyah, Farhan Adipratama, M. Farhan Hardwin, Fahrian Aryasa, Adam Garaudy, Aldy Tririfky, M. Rizky Ramadhan, Frenza Adiriandi, Rd. Fahrizal Ahadisuryo, Djodi

Fauzan, Egar M. Iqbal juga Ari Budi Santosa yang telah banyak membantu saya berdiskusi juga menerima kiriman file untuk dicek dan dimintai pendapat serta membawa saya kabur ke Budara tatkala saya sudah muak mengerjakan skripsi ini, terima kasih;

- Terima kasih juga kepada M. Rizky Widyawan yang telah menjadi senior pembimbing saya dalam menulis seminar sebelumnya. Serta Ka Imam Assovie dan ka Falencia Naoenz inspirasi saya selama di HI UNPAR;
- Kepada teman seperjuangan saya di semester ini Nadya Ridha Irfany yang telah mendengar segala keluh kesah dan kekhawatiran selama ini serta mau merencanakan target ke depan. Terima kasih sudah mau menjadi teman yang realistis dalam menghadapi masa depan sejak awal bertemu di delegasi Haiti GINTRE;
- Untuk teman seperjuangan saya juga Adriana Anjani, semoga kita bisa menghadapi masa selanjutnya dengan kuat. Juga Ivan Samuel yang selalu saya tanyai progressnya biar ada teman, Alhamdulillah bisa lulus juga;
- Terima kasih juga kepada Hera Decishaera teman saya yang selalu menanyakan perkembangan saya dan menenangkan saya. Ulvie Hutami Nugraha yang mau menampung saya mengerjakan skripsi di rumahnya saat saya takut sendiri di rumah;
- Selamat untuk teman-teman magang saya di HUMAS UNPAR Stanislaus Tibi Avelino dan Yudhistira Adi Sutera, yang akan mengenakan Toga bersama di tanggal 24 Februari nanti. Tak lupa teman kerja *part-time* saya Aquilina Lati, semoga bisa mengunjungi wisuda September nanti;

- Untuk kawan saya Hanura Krista Koentara, Reza Yanuar semoga bisa lekas menyelesaikan pendidikannya sebagai perwira, GO PRASPA 2019. Juga Whisnu Baruna yang tengah berjuang menjadi Bintara Tentara, semoga menjadi rejekimu;
- Salam saya untuk teman-teman yang sedang berusaha menyelesaikan studinya dan adik-adik yang akan menyusul kami, terutama teman-teman di KSMPMI (Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional). Saya tunggu kabar bahagia dari Via, Defe, Flo, Baban, Christa, Togu, Aisha, Beldom, Gleneagles, Memet, Salman, Esther juga teman-teman lainnya;
- Terima kasih juga pada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan pelajaran yang telah diberikan pada penulis selama ini. Semoga Tuhan membalasnya.
- Sebagai penutup ucapan terima kasih yang panjang ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada diri saya sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini serta menyelesaikan studi di HI UNPAR. Semester tujuh ini menjadi saksi betapa kehidupan menjadi sulit, rasanya tak mungkin bisa menyelesaikan skripsi di tengah kewajiban untuk magang, kerja *part-time*, mengerjakan penelitian lainnya serta masih harus mengikuti kelas. Semoga bila pada masa yang sulit ke depannya, penulis harap dapat ingat bahwa penulis telah melalui fase ini sebelumnya dengan baik. Untuk segala waktu yang saya tidak bisa luangkan untuk berlibur selama melewati fase ini, saya percaya semua ini tidak akan sia-sia. Terima kasih, *Sincerely*.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.2.1. Pembatasan Masalah .....	5
1.2.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Kajian Literatur .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran .....	11
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	17

1.7. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KLAIM NINE DASH-LINE DAN TINDAKAN CHINA DI</b>	
<b>WILAYAH LAUT CHINA SELATAN .....</b>	<b>21</b>
2.1. Klaim <i>Nine-dash Line</i> China di Laut China Selatan .....	21
2.1.1. Perkembangan Klaim China .....	23
2.1.2. Hak Historis dalam Klaim <i>Nine-dash Line</i> China .....	26
2.1.3. Sengketa Wilayah di LCS.....	30
2.2. Peningkatan Kapabilitas Militer dan Kebijakan China Terkait Laut China Selatan.....	36
2.2.1. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Militer di Wilayah LCS .....	37
2.2.2. Peningkatan Alutsista China yang Ditempatkan di LCS .....	41
2.2.3. Kebijakan Penjagaan dan Pengelolaan Wilayah Laut China Selatan.....	45
a. Peran Militer dan <i>Coast Guard</i> .....	45
b. Kebijakan Pengelolaan Wilayah LCS.....	49
2.3. Perilaku Ofensif China di Wilayah Laut China Selatan .....	50
<b>BAB III RESPON INDONESIA TERKAIT AGRESIVITAS CHINA</b>	
<b>DI LAUT CHINA SELATAN .....</b>	<b>53</b>
3.1. Kebijakan Pertahanan Indonesia mengenai Wilayah Indonesia di LCS	53
3.1.1. Landasan Formal Indonesia di Bidang Pertahanan terhadap Sengketa Laut Tiongkok Selatan .....	54

3.1.2. Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung Pertahanan Indonesia di LCS.....	58
a. Pembangunan Pangkalan Militer di Kepulauan Natuna .....	58
b. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pertahanan di Pulau Terluar dan Terdepan Dekat LCS .....	63
3.1.3. Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Indonesia .....	67
3.1.4. Kegiatan Militer Indonesia di Wilayah LCS.....	74
3.2. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Sengketa Laut China Selatan	78
3.3. Pendekatan Pertahanan Indonesia.....	82
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
<b>LAMPIRAN</b> .....	100

**DAFTAR GAMBAR**

2.1. <i>Nine-dash Line</i> pada Paspor China .....	29
2.2. Peta Wilayah yang Bersengketa di Laut China Selatan .....	30
2.3. Wilayah Indonesia yang Bersinggungan dengan <i>Nine-dash Line</i> .....	33
2.4. Lokasi Kapal <i>Kway Fey</i> di Wilayah ZEE Indonesia.....	36
2.5. Proyeksi Kekuatan dan Kapabilitas China di Laut China Selatan .....	40
3.1. Rencana Pembangunan Fasilitas Militer di Pulau Natuna .....	60

**DAFTAR GRAFIK**

1.1 Langkah-langkah Penelitian Kualitatif .....	18
2.1. Lini Masa Perkembangan Klaim China di LCS.....	24
2.2. Anggaran Pengeluaran Pertahanan Negara—negara Asia.....	42
3.1. Perilaku Negara Defensif dan Aplikasinya oleh Indonesia dalam Sengketa LCS.....	84



**DAFTAR TABEL**

1.1. Indikator Faktor Geografis dan Teknologi <i>Offense Defense Balance</i> .....	16
2.1. Klaim di Wilayah Laut China Selatan .....	31
2.2. Perbandingan Alutsista China di Tahun 2012 & 2017.....	42
2.3. Pertambahan Kapal Patroli CCG Tahun 2015 .....	48
3.1. Analisis Perilaku Indonesia Menanggapi Sengketa LCS.....	57
3.2. Rencana Pembangunan Fasilitas Militer di Wilayah-wilayah Pulau Natuna .....	60
3.3. Indikator Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut dan Udara Tahun Anggaran 2016-2018.....	68
3.4 Alutsista TNI AL dan TNI AU Tahun 2014 dan 2017 .....	71
3.5. Jumlah Kapal Instansi di Laut Indonesia Tahun 2014 dan 2017 .....	74
3.7. Latihan Militer Indonesia di Natuna Tahun 2014-2017.....	75

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Peta <i>Eleven Dash-Line</i> .....	100
Lampiran 2 Peta <i>Nine Dash-Line</i> .....	101
Lampiran 3 Pembangunan di <i>Fiery Cross Reef</i> , Kepulauan Spratly .....	102
Lampiran 4 Pembangunan di Pulau Woody, Kepulauan Paracel .....	103
Lampiran 5 Proyeksi Pengadaan Alutsista TNI AL untuk MEF Renstra II dan III.....	104

**DAFTAR SINGKATAN**

Alutsista	: Alat Utama Sistem Persenjataan
ASCM	: <i>Anti-Ship Cruise Missiles</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASUW	: <i>Anti-Surface Warfare</i>
ASW	: <i>Anti-Submarine Warfare</i>
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
BPPI	: Buku Putih Pertahanan Indonesia
CCG	: <i>China Coast Guard</i>
CIWS	: <i>Close-In Weapons Systems</i>
CoC	: <i>Code of Conduct</i>
DD	: <i>Defense Dominated World</i>
DoC	: <i>Declaration of Conduct</i>
DSNS	: <i>The Netherland's Damen Schelde Naval Shipbuilding</i>
FLEC	: <i>Bureau of Fisheries and Law Enforcement Command</i>
Gerbangdutas	: Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KPLP	: Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
LCS	: Laut China Selatan
LST	: <i>Landing Ship Tank</i>

MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
MLE	: <i>Maritime Law Enforcement</i>
OD	: <i>Offense Dominated World</i>
ODB	: <i>Offense-defence Balance</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PLA	: <i>People Liberation Army</i>
PLAAF	: <i>People Liberation Army Air Force</i>
PLAN	: <i>People Liberation Army Navy</i>
PPKT	: Pulau Pulau Kecil Terluar
RRC	: Republik Rakyat China
SAM	: <i>Surface to Air Missiles</i>
SLBM	: <i>Submarine-Launched Ballistic Missile</i>
SSBNs	: <i>Nuclear-Powered Ballistic-Missile Submarines</i>
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik di Laut China Selatan (LCS) telah menjadi salah satu yang mengemuka dan sangat kompleks untuk diselesaikan. Klaim *Nine-dash Line* melibatkan beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam juga negara lain di luar ASEAN, yaitu Taiwan.<sup>1</sup>

Dalam klaimnya, China menekankan aspek *historical rights* akan Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha (Kepulauan Spratly) serta wilayah perairan disekitarnya<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan, China menggunakan Deklarasi Kairo dan Deklarasi Postdam sebagai dasar hukum dan dasar historis pemulihan kepemilikannya atas Kepulauan Spratly dan Paracel dari Jepang. Atas dasar tersebut, tahun 1948 munculah yang disebut dengan *Eleven-dash Line*.<sup>3</sup> Setelah merdeka di tahun 1949, pemerintah Republik Rakyat China (RRC) menjadikan *Eleven-dash Line* menjadi *Nine-dash Line* dikarenakan berdirinya negara Vietnam beberapa tahun kemudian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Robert Backman, "The UN Convention on the Law of The Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea", The American Journal of Law, Vol. 107:42 (2013): hlm. 42.

<sup>2</sup> Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines," 7 Desember 2014, diakses pada 13 Desember 2016, [http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/t1217147.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml).

<sup>3</sup> Anonim, "回顾中国南海维权百年：外国侵占逼出主权意识\_新闻\_腾讯网 (Meninjau Ulang Seratus Tahun Melindungi Hak Laut China Selatan: Invasi Luar Negeri Melepaskan Kedaulatan)," 1 Juni 2012, diakses pada 30 Maret 2017, <http://news.qq.com/a/20120601/001068.htm>.

<sup>4</sup> Zou Keyuan, "China's U-Shaped Line in the South China Sea Revisited," *Ocean Development & International Law* 43, no. 1 (January 1, 2012): hlm. 83, <https://doi.org/10.1080/00908320.2012.647483>.

Selain itu, China merasa dirugikan hak atas kedaulatannya di Xinsha dan Nansha karena tidak dilibatkan dalam perjanjian damai *San Fransisco* yang membahas kepemilikan wilayah tersebut.<sup>5</sup> Karenanya China tidak pernah merasa telah melakukan kesalahan dalam melakukan klaimnya dan menimkati hak historis akan kedaulatannya. Dalam hal ini pun *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) belum dapat menyelesaikan klaim tumpang tindih ini.

Sementara posisi Indonesia yang berbatasan langsung dalam dinamika di Laut China Selatan tidak bersengketa seperti 5 (lima) negara lainnya atau *non-claimant*, dikarenakan tidak ada klaim kedaulatan wilayah Indonesia yang tumpang tindih dalam isu ini.<sup>6</sup> Di samping itu, Indonesia menunjukkan netralitas serta perannya sebagai *honest broker* dengan menjadi aktor penting dan aktif dalam mendorong proses perdamaian dalam konflik. Salah satunya dengan usaha Indonesia untuk mendorong terciptanya *Code of Conduct* (CoC) sebagai bentuk nyata dari implementasi *Declaration of Conduct* (DoC) ASEAN sebelumnya yang diharapkan *legally binding*.<sup>7</sup> Indonesia sendiri seringkali dikatakan sebagai *primus inter pares* dalam ASEAN.<sup>8</sup> Sebelumnya Indonesia bertindak sebagai fasilitator antara negara anggota ASEAN yang terlibat dalam konflik dengan China melalui diadakannya

---

<sup>5</sup> Jian Zhang, "China's Growing Assertiveness in the South China Sea: A Strategic Shift?," in Buszynski and Roberts, *The South China Sea and Australia's Regional Security Environment* (Canberra: National Security College, Australian National University, 2013), hlm. 19.

<sup>6</sup> Evan A. Laksmana, "The Domestic Politics of Indonesia's Approach to the Tribunal Ruling and the South China Sea," *Contemporary Southeast Asia*; Singapore 38, no. 3 (December 2016): hlm. 382-388.

<sup>7</sup> Carlyle A. Thayer, "Asia Times Online: Behind the Scenes of ASEAN's Breakdown," 27 Juli 2012, diakses pada 12 Februari 2017, [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/NG27Ae03.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NG27Ae03.html).

<sup>8</sup> Felix Heiduk, "Indonesia in ASEAN: Regional Leadership between Ambition and Ambiguity," SWP Research Paper, 6/2016 (Berlin, 2016), hlm. 6, diakses pada 12 Februari 2017, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-46859-8>.

diplomasi informal dalam bentuk *workshop-workshop* terkait penanganan konflik di Laut China Selatan.<sup>9</sup>

Kontribusi Indonesia sebagai pendorong terciptanya perdamaian dalam kasus ini memang mencitrakan Indonesia yang bersifat netral dan tidak terlibat dalam klaim.<sup>10</sup> Tentu Indonesia berada di posisi tengah yang strategis untuk dapat mengarahkan sengketa di kawasan menuju jalan damai, terutama dengan status sebagai *non-claimant* serta usahanya sebagai *honest broker*.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dinamika dan meningkatnya tensi di LCS memang tidak mengarah secara langsung kepada Indonesia. Namun sengketa ini memiliki implikasi kepada Indonesia terutama dengan perilaku China yang bersinggungan dengan Indonesia, yaitu adanya tumpang tindih atas klaim China pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna.<sup>11</sup> Pada peta *Nine-dash Line* yang dirilis di tahun 2009, memuat wilayah perairan Indonesia di Natuna bagian darinya yang dikatakan sebagai Zona Memancing Tradisional China (*traditional fishing ground*).<sup>12</sup> Hal ini pun memicu naiknya tensi hubungan Indonesia dengan China terutama pasca terlibatnya kapal *Coast Guard China* (CCG) dalam usaha

---

<sup>9</sup> Hasjim Djalal, "*Managing Potential Conflicts in the South China Sea*," World Scientific, November 23, 2006, hlm. 88.

<sup>10</sup> Scott Bentley, "*Book Review The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*," *Second Quarter*, 43, no. 2 (2015): hlm. 163-169.

<sup>11</sup> Bill Hayton, "*The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*" (Yale University Press, 2014), hlm. 88.

<sup>12</sup> Shiskha Prabawaningtyas, "*Traditional Fishing: A Game Changer in the SCS?*," *The Jakarta Post*, 14 April 2016, diakses pada 17 Februari 2017, <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/04/14/traditional-fishing-a-game-changer-in-the-scs.html>.

menghalangi TNI AL menderek kapal nelayan KM *Kway Fey* saat tertangkap berada di wilayah perairan Natuna<sup>13</sup> serta insiden berulang lainnya setelah itu. Ditambah dengan adanya peningkatan kapabilitas yang dilakukan militer China di wilayah tersebut.<sup>14</sup>

Menanggapi hal tersebut, Indonesia pun memiliki beberapa kebijakan pertahanan yang fokus pada wilayah Natuna dan sekitarnya yang dekat dengan wilayah LCS. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dicitrakan bahwa Jokowi memiliki pendekatan yang lebih agresif.

Adanya kebijakan-kebijakan pertahanan yang melingkupi pembangunan pangkalan militer di beberapa titik pulau terluar termasuk di Natuna<sup>15</sup> beserta peningkatan alutsista pertahanan melalui kerangka *Minimum Essential Force* (MEF) yang berorientasi pada pembangunan kekuatan sektor laut.<sup>16</sup> Baru-baru ini, Indonesia menggelar latihan Angkatan Udara, yaitu Angkasa Yudha 2016 pada tanggal 6 Oktober 2016 di Natuna, yang diindikasikan sebagai usaha untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas Natuna pasca insiden dengan kapal China.<sup>17</sup> Melihat langkah-langkah Indonesia ini, dapat diindikasikan bahwa Indonesia

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Office of the Secretary of Defense United States, “*Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2016*,” 26 April 2016, hlm. 55–75.

<sup>15</sup> Prashanth Parameswaran, “*A New Indonesia Military Base Near the South China Sea?*,” *The Diplomat*, 17 Juli 2015, diakses pada 17 Februari 2017, <http://thediplomat.com/2015/07/why-is-indonesia-building-a-new-south-china-sea-military-base/>.

<sup>16</sup> Menteri Pertahanan RI, “*Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*” (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2012), hlm. 4-5.

<sup>17</sup> Ankit Panda, “*South China Sea: Indonesian Military Stages Massive Natuna Sea Exercise*,” *The Diplomat*, 8 Oktober 2016, diakses pada 17 Februari 2017, <http://thediplomat.com/2016/10/south-china-sea-indonesian-military-stages-massive-natuna-sea-exercise/>; Lihat juga Randy Fabi, Agustinus Beo Da Costa, and Robert Birsell, “*Indonesia Air Force Holds Its Largest Military Exercise in South China Sea*,” *Reuters*, 4 Oktober 2016, diakses pada 17 Februari 2017, <http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia-idUSKCN124009>.



memiliki perhatian khusus dari segi pertahanan dalam menanggapi hal ini. Untuk itu tulisan ini akan membahas lebih lanjut terkait pendekatan pertahanan, tindakan-tindakan, strategi dan kebijakan pertahanan Indonesia dalam menanggapi klaim *Nine-dash Line* di Laut China Selatan.

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Dalam tulisan akademis ini, peneliti memlimitasi cakupan bahasan dikarenakan keterbatasan waktu, materi, dan hal – hal lainnya serta hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti lebih fokus dalam pembahasan. Tulisan ini akan membatasi tindakan Indonesia terkait sengketa di Laut China Selatan hanya pada tindakan-tindakan strategis yang berkaitan dengan pertahanan ataupun yang terkait. Sehingga aspek-aspek yang dibahas akan melingkupi kebijakan pertahanan, kebijakan pada militer Indonesia maupun kebijakan luar negeri yang memiliki korelasi dengan pertahanan nasional. Hal ini dikarenakan pembahasan akan peneliti arahkan menggunakan pendekatan studi keamanan sehingga hanya aspek-aspek tersebut yang akan dibahas dalam tulisan ini. Selain itu, peneliti akan membatasi kurun waktu pembahasan pada tahun 2014 hingga 2017. Hal ini didasari oleh pertimbangan peneliti yang fokus pada masa pemerintahan Joko Widodo yang dimulai sejak 2014 hingga 2017. Sehingga tidak adanya perbedaan karakter kebijakan karena tidak melingkupi kebijakan pada pemerintah sebelumnya.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu adanya kajian terkait sikap Indonesia dari aspek pertahanan dalam menanggapi klaim *Nine-dash Line*. Untuk itu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian **“Bagaimana pendekatan pertahanan yang diterapkan Indonesia dalam menanggapi Klaim *Nine-dash Line* China di Laut China Selatan?”**

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendekatan pertahanan secara spesifik yang Indonesia terapkan dalam menanggapi klaim *Nine-dash Line* China di Laut China Selatan.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu

- a. Secara praktis menjadi prasyarat untuk kelulusan peneliti dalam menempuh studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan;
- b. Tulisan ini dapat menghadirkan sudut pandang baru dalam mengkaji sengketa di Laut China Selatan dan keterlibatan Indonesia di dalamnya;
- c. Tulisan ini mendapat ruang diantara perdebatan akan inkonsistensi sikap Indonesia terhadap klaim *Nine-dash Line*;

- d. Tulisan ini kelak dapat menjadi salah satu rujukan bagi penstudi lainnya dalam memahami dinamika di Laut China Selatan dan implikasinya terhadap Politik Pertahanan Indonesia maupun studi terkait.

#### 1.4. Kajian Literatur

Berbicara mengenai sengketa di Kawasan Laut China Selatan sebagai akibat dari klaim *Nine-dash Line* China. Terdapat beberapa pembahasan dan pandangan dari para akademisi yang menyoroti kebijakan pertahanan maupun politik luar negeri Indonesia terkait hal tersebut yang dianggap tidak konsisten atau sebaliknya bahwa perilaku Indonesia secara politis maupun strategis memang naturalnya seperti itu.

Seperti dalam tulisan "*Delicate Equilibrium: Indonesia's Approach to the South China Sea*" oleh Prashanth Parameswaran, disebutkan bahwa Indonesia selama ini menggunakan pendekatan "*hedging*" atau penghindaran dengan tetap berusaha melindungi kepentingannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga "*delicate equilibrium*" dimana Indonesia melakukan pendekatan keras maupun tidak keras dalam menanggapi klaim *Nine-dash Line* serta dinamika konflik di kawasan tersebut.<sup>18</sup> "*Delicate equilibrium*" meliputi 4 (variable), yaitu *engagement*; *enmeshment*, *traditional balancing* dan *soft balancing*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Prashanth Parameswaran, "*Delicate Equilibrium: Indonesia's Approach to the South China Sea*," in *Power Politics in Asia's Contested Waters*, ed. Enrico Fels and Truong-Minh Vu, Global Power Shift (Springer International Publishing, 2016), hlm. 320, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-26152-2\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-319-26152-2_15).

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 323.

Penulis menyoroti perubahan atau pergeseran sikap yang mungkin terjadi sebagai akibat dari dinamika internal dan eksternal yang signifikan. Utamanya pada pemerintahan Jokowi di mana beberapa pihak merasa Jokowi kurang tertarik dan mengetahui tentang urusan luar negeri sehingga menciptakan kesempatan lebih besar untuk adanya pandangan baru yang mampu menggeser *status-quo* Indonesia.<sup>20</sup> Adapun tulisan ini menyiratkan kekhawatiran bila adanya pergeseran sikap Indonesia di Laut China Selatan dan menyampaikan adanya ketidakpastian sikap Indonesia ke depannya baik dalam pemerintahan Presiden Jokowi ataupun mendatang.<sup>21</sup>

Sama halnya dengan Prashanth Parameswaran, terdapat 2 (dua) tulisan yang menyoroti inkonsistensi sikap Indonesia mengenai Laut China Selatan, yaitu melalui tulisan Evan A. Laksmana dan Emirza Adi Syailendra.

Dalam tulisan “*The Domestic Politics of Indonesia’s Approach to the Tribunal Ruling and the South China Sea*”, Evan A. Laksmana menyoroti kebijakan dari pemerintah Jokowi di mana Presiden tidak begitu memiliki ketertarikan terhadap kebijakan luar negeri sehingga terdapat dinamika tersendiri dibalik pengambilan keputusan dan ditambah rekam jejak hubungan dengan China yang ambigu, membuat kebijakan Indonesia tidak konsisten mengenai sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>22</sup> Walaupun terdapat momen di mana Indonesia berusaha tegas dengan

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 332.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 323.

<sup>22</sup> Evan A. Laksmana, “*The Domestic Politics of Indonesia’s Approach to the Tribunal Ruling and the South China Sea*,” *Contemporary Southeast Asia*; Singapore 38, no. 3 (Desember 2016): hlm. 383.

tindakan Presiden mengunjungi Natuna, namun hal tersebut dirasa kurang dan Indonesia akan terus mengalami ketimpangan dengan China.<sup>23</sup>

Sementara Emirza Adi Syailendra dalam tulisannya yang berjudul “*A Nonbalancing Act: Explaining Indonesia’s Failure to Balance Against the Chinese Threat,*” berpendapat bahwa tidak adanya konsensus diantara aktor pengambil keputusan di dalam negeri yang mencegah Indonesia membuat respon yang koheren terhadap China. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan dan persepsi pihak-pihak atau aktor di dalam Indonesia yang berbeda mengenai ancaman dari China. Sekali lagi disebutkan bahwa terdapat andil Presiden Jokowi yang memiliki kepentingan investasi jangka pendek hingga menengah dengan Beijing yang dikhawatirkan dapat membatasi otonomi strategis Indonesia.<sup>24</sup>

Adapun, dalam mekanisme pengambilan keputusan luar negeri, terdapat aktor kuat yang selama ini berkecimpung, yaitu Kemlu dan TNI AD yang ingin mempertahankan *status-quo* Indonesia sementara di sisi lain terdapat Angkatan Laut dan Kementerian Perikanan, yang menginginkan adanya sikap lebih keras terhadap China tetapi posisi mereka tidak unggul dalam hal ini.<sup>25</sup> Karenanya, tulisan ini berargumen bahwa kedepannya mungkin Indonesia akan terus mempertahankan posisinya sebagai *status-quo* yang tidak seimbang dan tak mampu menjawab ancaman dari China.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 387.

<sup>24</sup> Emirza Adi Syailendra, “*A Nonbalancing Act: Explaining Indonesia’s Failure to Balance Against the Chinese Threat,*” *Asian Security*, September 5, 2017, hlm. 2, <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1365489>.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 6.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 2.

Namun di sisi lain, melalui tulisan “*Strategic hedging in Indonesia’s defense diplomacy*” oleh Iis Gindarsah menyatakan bahwa diplomasi pertahanan yang dilakukan Jakarta selama ini di kawasan berupaya memoderasi dampak perubahan geopolitik sekaligus menjaga kemampuan defensif negara terhadap ketidakpastian regional. Kondisi ini ditempuh melalui agenda *hedging* yang dimanfaatkan dalam diplomasi pertahanan Indonesia.<sup>27</sup> Yang mana pada satu sisi, militer dan unsur pertahanan Indonesia ikut terlibat dalam usaha membangun kepercayaan, ikut serta dalam usaha untuk mencapai resolusi konflik yang damai melalui proses multilateral yang seragam, yaitu dalam mekanisme ASEAN.<sup>28</sup> Sementara di sisi lainnya Indonesia menggunakan diplomasi bilateralnya untuk meningkatkan kemampuan militer serta industri strategis dalam negerinya.<sup>29</sup>

Argumen Iis Gindarsah ini pun peneliti kaitkan dengan tulisan Evan E. Laksmana “*The enduring strategic trinity: explaining Indonesia’s geopolitical architecture*” yang menyatakan aspek militer atau keamanan yang dikategorikan sebagai aspek geostrategi dan dimensi sosial politik yang disebut sebagai geopolitik bersama dengan geoekonomi (dimensi sumber daya dan ekonomi) mampu memengaruhi pemikiran strategis, kebijakan luar negeri dan sistem keamanan nasional Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Iis Gindarsah, “*Strategic Hedging in Indonesia’s Defense Diplomacy*,” *Defense & Security Analysis* 32, no. 4 (Oktober 1, 2016): hlm. 15, <https://doi.org/10.1080/14751798.2016.1233695>.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 6-10.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 10-14.

<sup>30</sup> Evan A. Laksmana, “*The Enduring Strategic Trinity: Explaining Indonesia’s Geopolitical Architecture*,” *Journal of the Indian Ocean Region* 7, no. 1 (Juni 1, 2011): hlm. 111-112, <https://doi.org/10.1080/19480881.2011.587333>.

Dari perdebatan tersebut, peneliti menyadari adanya inkonsisten sikap Indonesia terhadap sengketa di Laut China Selatan terutama dengan perbedaan sikap politik luar negeri Indonesia dengan kebijakan pertahanan yang baru-baru ini dilaksanakan dan mengarah pada penguatan aspek militer di dekat wilayah LCS. Adapun dengan adanya 2 (dua) kebijakan, yaitu kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan, peneliti memfokuskan tulisan ini untuk analisis menggunakan teori dari studi keamanan untuk melihat bagaimana pendekatan pertahanan Indonesia secara spesifik terkait sengketa di LCS.

Analisis ini bertujuan untuk melihat lebih jelas sikap Indonesia utamanya dalam bidang pertahanan di antara inkonsistensi kebijakan atau respon Indonesia terhadap China sebagaimana yang telah dikemukakan dalam literatur-literatur sebelumnya. Lalu, penulis melihat bahwa adanya kesamaan persepsi yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan literatur peneliti sebelumnya, yaitu Iis Gindarsah. Namun sekali lagi, tulisan ini secara tegas akan menggunakan teori dari studi keamanan sebagai kerangka pemikiran dan analisis sehingga memiliki perbedaan dari tulisan-tulisan sebelumnya.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Untuk membahas pendekatan pertahanan Indonesia dalam menanggapi klaim *Nine-dash Line* dan dinamika di Laut Cina Selatan, penulis menggunakan pendekatan ***Offense-defense Balance (ODB)*** dari **Robert Jervis** yang memiliki beberapa indikator terstruktur untuk memudahkan analisis dalam tulisan ini.

Pendekatan ini menyadari bahwa kondisi anarkis menjadi sumber perilaku negara. *Offense-defense Balance* Jervis dipercayai pengembangan dari *defensif realism*, berargumen bahwa negara mencoba memaksimalkan keamanannya di tengah kondisi anarki (*self-help*)<sup>31</sup> untuk meminimalisir resiko negara tersebut dihancurkan. Usaha memaksimalkan keamanan tersebut dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu ofensif dan defensif.<sup>32</sup>

Perspektif *offense-defense* pun sangat berkaitan dengan konsep *security dilemma*, yang menurut Jervis merupakan konsekuensi dari tindakan yang mulanya bersifat defensif namun secara tidak disengaja dan tidak diinginkan direpresentasikan dalam dua kondisi, yaitu “*sebuah negara mencoba meningkatkan keamanannya dengan mengurangi keamanan orang lain*” dan “*keuntungan yang diperoleh negara dalam aspek keamanan terkadang secara tidak sengaja mengancam pihak lain yang lebih lemah.*”<sup>33</sup> Sehingga menentukan atau membedakan aspek ofensif dan defensif secara jelas menjadi penting.<sup>34</sup> Selain itu, Jervis berpendapat bahwa tingkat dilemma keamanan dapat diatur oleh faktor fisik/material seperti teknologi dan geografi juga faktor psikologis/perseptual seperti mispersepsi.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (McGraw-Hill Higher Education, 1979).

<sup>32</sup> Sean M. Lynn-Jones, “*Offense-Defense Theory and Its Critics*,” *Security Studies* 4, no. 4 (Juni 1, 1995): hlm. 664-665, <https://doi.org/10.1080/09636419509347600>.

<sup>33</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* (Princeton University Press, 1976), hlm. 66.

<sup>34</sup> Robert Jervis, “*Was the Cold War a Security Dilemma?*,” *Journal of Cold War Studies* 3, no. 1 (1 Januari 2001): hlm. 57, <https://doi.org/10.1162/15203970151032146>.

<sup>35</sup> Jeffrey W. Taliaferro, “*Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited*,” *International Security* 25, no. 3 (2000): hlm. 137.



Dalam *offense-defense balance*, aspek ofensif dan defensif menjadi penentu suatu negara akan mempertahankan posisinya<sup>36</sup> dan bagaimana hal tersebut menentukan strategi juga postur pertahanannya<sup>37</sup> kedua aspek tersebut dihadapkan pada 3 (tiga) kondisi, yaitu (1) *security dilemma*, (2) peningkatan kapabilitas militer dan (3) pilihan untuk menyerang atau bertahan.<sup>38</sup>

Pespektif ini berargumen bila ofensif lebih menguntungkan maka negara lebih baik ekspansionis dan menyerang terlebih dahulu (*offense dominated* atau **OD**).<sup>39</sup> Dalam OD, dipercayai bahwa “*komitmen, strategi atau teknologi mendikte bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan adalah dengan ekspansi.*” Sehingga negara akan berperilaku sebagai aggressor (menyerang) walaupun ekspansi itu sendiri tidak selalu menjadi tujuan utama.<sup>40</sup> Dengan melakukan serangan terlebih dahulu ketimbang pihak lainnya, kemenangan akan diraih dengan relatif cepat, tidak banyak terjadi pertumpahan darah serta mutlak melalui serangan yang sukses dan mampu melemahkan pihak lainnya.<sup>41</sup>

Selain itu, negara ofensif cenderung tidak mengarahkan sikapnya untuk bekerjasama, dikarenakan:<sup>42</sup>

- (1) Perang akan lebih menguntungkan pemenang. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan negara menjadi lebih rendah sementara negara yang

---

<sup>36</sup> Robert Jervis, “*Cooperation Under the Security Dilemma*,” *World Politics* 30, no. 2 (1978): hlm. 186-187, <https://doi.org/10.2307/2009958>.

<sup>37</sup> Charles L. Glaser and Chaim Kaufmann, “*What Is the Offense–Defense Balance and Can We Measure It?*,” *International Security* 22, no. 4 (1998): hlm. 44, <https://doi.org/10.2307/2539240>.

<sup>38</sup> Jervis, “*Cooperation Under the Security Dilemma*,” hlm 186-194.

<sup>39</sup> Glaser and Kaufmann, “*What Is the Offense–Defense Balance and Can We Measure It?*,” hlm. 44.

<sup>40</sup> Jervis, “*Cooperation Under the Security Dilemma*,” hlm. 187.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 189-190; lihat juga George H. Quester, “*Offense and Defense in the International System*,” (New York: John Wiley, 1977), hlm. 106-107.

kalah akan menanggung kerugian (*winner's take all*). Selain itu, negara yang memiliki ketakutan mengenai kekalahan akan berusaha melakukan kerjasama untuk menstabilkan posisinya;

- (2) Perang diperkirakan akan sering terjadi dan berlangsung singkat. Sehingga akan adanya insentif yang tinggi untuk meningkatkan persenjataannya (anggaran pertahanan), mendukung reaksi cepat dan kuat dalam rangka menanggapi lawan karena tidak ada waktu untuk memprediksi serta membuktikan kegiatan yang sama pada lawannya;
- (3) Negara akan cenderung membuat aliansi cepat. Pada kondisi damai, adanya aliansi mampu menciptakan sistem internasional yang bipolar dan meningkatkan ketegangan. Kondisi ini dapat menyebabkan negara-negara yang membentuk kerjasama tidak dapat mengambil keuntungan dari kerjasamanya.
- (4) Negara akan memiliki ambang persepsi yang rendah dalam melihat ancaman dan dengan cepat mengindikasikan bukti yang ambigu sebagai sikap agresif pihak lain.

Adapun, negara yang ofensif akan menanggapi ketegangan internasional dengan meningkatkan peluang perang dan negara lain akan berusaha melakukan tindakan pre-emptif.<sup>43</sup> Sehingga sistem internasional cenderung tidak stabil dan dilemma keamanan akan meningkat secara signifikan.

---

<sup>43</sup> Thomas C. Schelling, "*The Strategy of Conflict*," (New York: Oxford University Press, 1963), hlm. 134-135.

Sementara, bila bertahan lebih menguntungkan negara, maka lebih baik menjaga dari serangan musuh dan mempertahankan wilayah juga sumber daya yang dimiliki ketimbang melakukan serangan atau ekspansi (*defense dominated* atau **DD**).<sup>44</sup> Selain itu, perang cenderung menjadi jalan buntu dan hanya bisa dimenangkan dengan biaya yang sangat besar.<sup>45</sup>

Bila bertahan lebih menguntungkan, ada beberapa kondisi yang cenderung dilakukan negara, yaitu:<sup>46</sup>

- (1) Negara cenderung bersiap untuk menerima serangan dan tidak melakukan tindakan pre-emptif karena akan menjadi sia-sia untuk menggunakan sumber daya militernya. Orientasinya pun berusaha mempertahankan wilayah teritorialnya;
- (2) Adapun, pilihan dalam bertahan seringkali dijatuhkan pada peningkatan kapabilitas militer sebagai manifestasi negara mengkonversi kekuatannya ke dalam kapabilitas militernya. Namun hal ini harus didukung adanya persyaratan kemanan yang masuk akal untuk menghindari perlombaan senjata (*arms race*);
- (3) Perlu adanya kebijakan yang kompatibel untuk menghindari perlombaan senjata (*arms race*);
- (4) Masing-masing pihak dapat memiliki kekuatan militer yang jauh lebih kecil daripada yang lain atau tidak mencolok dan dapat bersikap acuh tak acuh terhadap berbagai kebijakan pertahanan lainnya.

---

<sup>44</sup> Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma," hlm. 187.

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 190.

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 187-190; Lihat juga Glaser and Kaufmann, "What Is the Offense-Defense Balance and Can We Measure It?," hlm. 45.

dimana pun dilema keamanan dikurangi.

- (5) Negara dapat membuat dirinya lebih aman tanpa membahayakan orang lain. Sehingga dilemma keamanan tidak dapat menghambat negara-negara untuk bekerjasama, melakukan agresi dan efek anarki menjadi nihil. Dalam DD perubahan *status-quo* jarang terjadi sehingga kerja sama lebih sering terjadi;

Dalam ODB, Jervis mengidentifikasi 2 (dua) faktor yang dapat menentukan suatu negara akan bertahan atau menyerang, yaitu faktor geografis dan teknologi.<sup>47</sup> Di mana masing-masingnya melingkupi aspek tersendiri. (Lihat Tabel 1.2. Indikator Faktor Geografis dan Teknologi *Offense Defense Balance*)

Tabel 1.2. Indikator Faktor Geografis dan Teknologi *Offense Defense Balance*

<b>Teknologi</b>	<b>Geografi</b>
<i>Penaklukan Wilayah</i> , Terkait sikap ofensif atau defensif yang lebih menguntungkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya	Faktor fisik mendukung negara yang bertahan (jalur suplai dll)
<i>Sumber Daya Relatif yang harus Dikeluarkan</i> pihak ofensif untuk mengatasi pihak yang defensif.	Aspek sungai dan laut menghambat proyeksi kekuasaan
<i>Karakteristik Persenjataan</i> , cenderung melindungi (defensif) atau memiliki mobilitas tinggi dan memiliki kekuatan yang mencolok (ofensif)	Perbatasan sesuai dengan geografi; dan faktor geografi membatasi perluasan oleh pihak ofensif
<i>Intensi untuk Menyerang Lebih Dulu</i> , di mana dengan fasilitas yang telah dimiliki, negara akan memilih untuk ofensif atau defensif	Adanya keterikatan terhadap tanah air (nasionalisme) menghasilkan perlawanan yang menghambat pihak ofensif

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma," 194.

<sup>48</sup> Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma"; Lihat juga Jack S. Levy, "The Offensive/Defensive Balance of Military Technology: A Theoretical and Historical Analysis,"

Dari kerangka pemikiran tersebut peneliti sampai pada pernyataan penelitian di mana Indonesia menerapkan pendekatan pertahanan yang bersifat defensif dengan segala manifestasinya. Hal ini memang tidak secara gamblang Indonesia nyatakan tetapi secara tersirat ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan yang dilakukan dalam aspek pertahanan yang bersifat defensif di pulau-pulau terluar dan perairan yang berbatasan secara langsung dengan Laut China Selatan.

### **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metodologi kualitatif cenderung memperhatikan kata-kata dan beberapa aspek seperti hubungan teori dengan penelitian, pemahaman terhadap dunia sosial melalui interpretasi dan proses sosial dipahami sebagai interaksi (konstruksi).<sup>49</sup> Metode ini berusaha menjelaskan dan menafsirkan data-data yang bersifat alamiah (tersedia dalam kehidupan bukan rekayasa atau pengkondisian) juga lebih tepat untuk digunakan bila berhadapan dengan fakta atau kenyataan yang bersifat ganda.<sup>50</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mencoba menginterpretasikan data-data dari kebijakan maupun aplikasi kebijakan yang merupakan suatu konstruksi subjek yang diteliti dengan kesesuaian dalam teori. Selain itu, kondisi objek yang akan diteliti dirasa memiliki perbedaan kondisi sehingga peneliti harus menyesuaikan desain penelitian dengan keadaan atau fakta yang tersedia.

---

*International Studies Quarterly* 28, no. No.2 (June 1984): hlm. 227,  
<https://doi.org/10.2307/2600696>.

<sup>49</sup> Alan Bryman, "*Social Research Methods*", 4th Edition (New York: Oxford University Press, 2012), hlm 380.

<sup>50</sup> Dr. Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 5.

Adapun penelitian ini menekankan penggunaan teori sebagai kerangka analisis dan desain penelitiannya dengan langkah-langkah penelitian sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut (Lihat Grafik 1.1 Langkah-langkah Penelitian Kualitatif)

Grafik 1.1 Langkah-langkah Penelitian Kualitatif



Sumber: Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th Edition (New York: Oxford University Press, 2012), hlm 384

Pada teknik pengambilan data, peneliti memfokuskan pada kajian data-data dalam bentuk kumpulan dokumen atau teks kualitatif (studi pustaka)<sup>51</sup> yang mencakup dokumen resmi dari negara, dokumen resmi yang dirilis sumber swasta, output dari media massa dan dokumen virtual.<sup>52</sup>

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dituangkan ke dalam 4 (empat) bab. Dimana Bab I akan membahas pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

<sup>51</sup> Bryman, "Social Research Methods", hlm. 543.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 549-557.

penelitian, kajian literatur, kerangka berpikir juga metodologi penelitian serta teknik pengumpulan data.

Pada Bab II akan disajikan data mengenai Klaim *Nine Dash-line* dan Tindakan China di Wilayah Laut China Selatan. Bab ini akan dibagi ke dalam beberapa poin penyajian data, yaitu: (1) Pembahasan mengenai klaim yang meliputi perkembangan klaim *Nine-dash Line* dan penekanan terhadap hak historis China di wilayah tersebut serta pembahasan mengenai sengketa wilayah tersebut dengan *claimant state* lainnya maupun Indonesia yang merupakan *non-claimant state*. Lalu akan dibahas pula (2) peningkatan kapabilitas militer dan kebijakan China terkait Laut China Selatan yang mencakup kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur militer di wilayah tersebut oleh China yang dibarengi dengan adanya peningkatan Alutsista China yang ditempatkan di LCS serta akan dibahas pula kebijakan penjagaan dan pengelolaan wilayah Laut China Selatan yang melibatkan peran militer, *coast guard* juga instansi terkait lainnya. Adapun, data-data tersebut akan digunakan untuk melihat perilaku ofensif China di Wilayah Laut China Selatan.

Pada Bab III akan membahas respon Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan dengan menggunakan kerangka pemikiran *offense-defense balance* Jervis dalam menganalisis pendekatan pertahanan Indonesia yang ditinjau dari data mengenai (1) Kebijakan Pertahanan Indonesia mengenai Wilayah Indonesia di LCS yang meliputi pemaparan mengenai landasan formal Indonesia di bidang pertahanan terhadap Sengketa Laut China Selatan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung pertahanan Indonesia di LCS seperti pangkalan militer di

Kepulauan Natuna, pembangunan di pulau terluar dan terdepan dekat LCS, peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia, serta kegiatan militer Indonesia di wilayah LCS. Selanjutnya akan dilihat pula (2) aspek kebijakan luar negeri Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan. Melalui analisis dan pembahasan data-data tersebut, peneliti akan melihat pendekatan pertahanan Indonesia dalam merespon klaim *Nine-dash Line* yang sesuai dengan kerangka pemikiran dari Jervis

Pada Bab IV, peneliti akan menyimpulkan temuan-temuan dari pembahasan pada Bab III yang telah didukung oleh data dari Bab II, sekaligus menjawab rumusan permasalahan yang ada di Bab I.